

Divergensi *Belief Systems* Aktor dan Sustainable Tourism Governance dalam Implementasi Kebijakan Desa Wisata Berbasis *Community-Based Tourism* di Banyuwangi

Adetya Mahendra¹, Andrean Caspari²

^{1,2} Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: ¹Adetya.mahen-2025@fisip.unair.ac.id, ²Andrean.caspari-2023@fisip.unair.ac.id

Keywords:

Advocacy Coalition Framework; Belief Systems; Community-Based Tourism; Sustainable Tourism Governance; Tourism Villages

Kata Kunci:

Advocacy Coalition Framework; Belief Systems; Desa Wisata; Community-Based Tourism; Sustainable Tourism Governance

Article history:

Submitted: 7-05-2026;
Revision: 14-05-2026;
Accepted: 20-05-2026;
Published: 07-06-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze how divergences in actors' belief systems influence the realization of sustainable tourism governance within Community-Based Tourism (CBT) villages in Banyuwangi Regency, Indonesia. Employing a descriptive qualitative approach grounded in social constructivism, the research examines four tourism villages: Kemiren, Tamansari, Kampunganyar, and Bangsring. Data were collected from secondary sources and analyzed using an interactive model involving data condensation, data display, and conclusion verification. The findings reveal a persistent cognitive contestation between the Economy-Corporate Oriented Developer Coalition and the Community-Conservation Based Preserver Coalition. Divergent beliefs regarding tourism development priorities have contributed to cultural commodification, institutional fragmentation, and disparities in local capacity, thereby constraining the achievement of sustainable tourism governance. Nevertheless, Bangsring Village demonstrates a successful governance model through

regulatory reconciliation, particularly following the enactment of Village Regulation No. 4 of 2018, which strengthened collaboration among local stakeholders. The study highlights that sustainable tourism governance depends on inclusive dialogue mechanisms, the mediating role of policy brokers, and continuous policy-oriented learning processes that facilitate adaptation at the secondary belief level. The originality of this research lies in uncovering the cognitive and ideological dimensions underlying institutional interactions between Village-Owned Enterprises (BUMDes) and Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), and explaining how these dynamics shape the sustainability of community-based tourism governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana divergensi belief systems antaraktor memengaruhi terwujudnya sustainable tourism governance pada desa wisata berbasis Community-Based Tourism (CBT) di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan paradigma konstruktivisme sosial dengan lokasi penelitian di Desa Adat Kemiren, Desa Wisata Tamansari, Desa Wisata Kampunganyar, dan Desa Wisata Bangsring. Data sekunder dikumpulkan dan dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontestasi kognitif yang kuat antara Koalisi Pengembang Berorientasi Ekonomi-Korporat dan Koalisi Pelestari Berbasis Komunitas-Konservasi. Perbedaan sistem keyakinan tersebut memunculkan kecenderungan komersialisasi budaya, fragmentasi kelembagaan, dan kesenjangan kapasitas masyarakat yang menghambat terwujudnya tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Namun demikian, Desa Bangsring menunjukkan praktik tata kelola yang relatif berhasil melalui rekonsiliasi regulatif yang diperkuat oleh Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 sehingga mampu membangun kolaborasi antaraktor secara lebih efektif. Temuan penelitian menegaskan bahwa sustainable tourism governance memerlukan ruang dialog yang inklusif, peran strategis policy brokers, serta proses policy-oriented learning yang berkelanjutan untuk menjembatani perbedaan pada tingkat secondary beliefs. Kebaruan penelitian ini terletak pada kemampuannya mengungkap dimensi kognitif dan ideologis yang membentuk dinamika hubungan antara BUMDes dan Pokdarwis serta implikasinya terhadap keberlanjutan tata kelola desa wisata berbasis komunitas.



Pariwisata global telah mengalami transformasi paradigma yang sangat mendasar dalam beberapa dekade terakhir. Model pariwisata massal (*mass tourism*) yang cenderung eksploitatif terhadap sumber daya alam dan memarjinalkan komunitas lokal secara perlahan mulai ditinggalkan (Lestari et al., 2025). Sebagai gantinya, berkembang pendekatan pariwisata yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Latianingsih et al., 2025). Perubahan orientasi tersebut sejalan dengan meningkatnya perhatian global terhadap keberlanjutan lingkungan, ketahanan komunitas, dan tata kelola destinasi yang mampu menjaga kualitas ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang paling banyak diadopsi dalam konteks ini adalah *Community-Based Tourism* (CBT) (Amelia et al., 2026). Konsep CBT menempatkan masyarakat lokal bukan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama yang berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembangunan pariwisata (Lestari et al., 2025). Melalui pendekatan ini, pembangunan pariwisata diarahkan untuk tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial, menjaga integritas lingkungan, serta melestarikan identitas budaya lokal (Latianingsih et al., 2025).

Dalam perspektif *sustainable tourism governance*, keberhasilan suatu destinasi wisata tidak lagi diukur semata-mata dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan atau kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Tata kelola pariwisata yang berkelanjutan juga ditentukan oleh kemampuan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya wisata, perlindungan lingkungan, dan distribusi manfaat ekonomi secara adil kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, keberlanjutan pariwisata sangat bergantung pada kualitas hubungan antaraktor, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif dalam pengelolaan destinasi wisata.

Di Indonesia, pengembangan desa wisata telah menjadi salah satu strategi nasional untuk mendorong pembangunan perdesaan yang inklusif sekaligus memperkuat konservasi budaya dan lingkungan. Kebijakan desa wisata tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat lokal (Latianingsih et al., 2025). Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang sering dijadikan rujukan dalam pengembangan desa wisata berbasis CBT. Berbekal kekayaan sumber daya alam, budaya, dan dukungan kebijakan daerah yang progresif, Banyuwangi berhasil mentransformasi dirinya dari daerah transit menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia (Fairuza, 2019). Transformasi tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, perluasan kesempatan kerja, diversifikasi mata pencaharian masyarakat, dan peningkatan pendapatan rumah tangga di kawasan wisata (Mubarok & Lokaprasidha, 2020).

Untuk memperkuat arah pengembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata sebagai landasan hukum dalam pengembangan destinasi berbasis masyarakat. Regulasi ini mengatur berbagai aspek pengembangan desa wisata, mulai dari standar kelayakan destinasi, pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, hingga kolaborasi antaraktor pembangunan (Akbar et al., 2022). Implementasi kebijakan tersebut diperkuat melalui berbagai program promosi budaya dan festival tahunan yang terintegrasi dengan aktivitas masyarakat lokal. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas

regulasi yang dirumuskan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda (Amelia et al., 2026).

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan desa wisata berbasis CBT di Banyuwangi menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Pengembangan pariwisata berkelanjutan sering kali mempertemukan berbagai aktor yang memiliki tujuan, kepentingan, dan orientasi nilai yang berbeda. Aktor-aktor tersebut meliputi pemerintah daerah, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Perum Perhutani, pelaku usaha swasta, lembaga adat, serta komunitas lokal (Latianingsih et al., 2025). Masing-masing aktor membawa perspektif yang berbeda mengenai arah pembangunan pariwisata, bentuk pemanfaatan sumber daya lingkungan, distribusi manfaat ekonomi, serta strategi pengelolaan destinasi wisata yang dianggap paling tepat. Perbedaan tersebut sering kali memunculkan ketegangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas tata kelola dan keberlanjutan destinasi wisata (Amelia et al., 2026).

Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan perspektif *Advocacy Coalition Framework* (ACF) yang dikembangkan oleh Sabatier dan Jenkins-Smith (1993). ACF memandang proses kebijakan sebagai arena interaksi berbagai koalisi aktor yang memiliki sistem keyakinan (*belief systems*) yang berbeda dan saling berkompetisi dalam memengaruhi arah kebijakan (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). Dalam kerangka ini, aktor-aktor yang memiliki kesamaan nilai dan pandangan akan membentuk koalisi advokasi untuk memperjuangkan kepentingan serta preferensi kebijakan yang mereka yakini. Sistem keyakinan tersebut terdiri atas tiga tingkatan, yaitu *deep core beliefs*, *policy core beliefs*, dan *secondary beliefs* yang secara bersama-sama memengaruhi sikap dan tindakan aktor dalam proses implementasi kebijakan (Henry et al., 2014; Sabatier & Jenkins-Smith, 1993).

Dalam konteks desa wisata di Banyuwangi, divergensi *belief systems* tampak pada perbedaan orientasi antara kelompok aktor yang menekankan efisiensi ekonomi, peningkatan investasi, dan profesionalisasi pengelolaan destinasi dengan kelompok yang lebih menekankan pelestarian budaya, konservasi lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat lokal. Kelompok pertama umumnya direpresentasikan oleh BUMDes dan sebagian aparatur pemerintahan desa, sedangkan kelompok kedua banyak diwakili oleh Pokdarwis, Pokmaswas, komunitas adat, dan kelompok masyarakat lokal (Amelia et al., 2026). Perbedaan orientasi tersebut tidak hanya memengaruhi proses pengambilan keputusan, tetapi juga berimplikasi terhadap keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan yang menjadi fondasi utama *sustainable tourism governance*. Kondisi ini terlihat pada berbagai desa wisata unggulan di Banyuwangi, seperti Desa Adat Kemiren yang berbasis pelestarian budaya Osing, Desa Wisata Tamansari sebagai kawasan penyangga ekosistem Gunung Ijen, Desa Wisata Kampunganyar yang mengandalkan potensi wisata alam, serta Desa Wisata Bangsring yang berkembang melalui pendekatan konservasi ekosistem pesisir dan bahari (Amelia et al., 2026; Mubarok & Lokaprasidha, 2020; Utami, 2022).

Meskipun kajian mengenai desa wisata di Banyuwangi telah berkembang cukup luas, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat, dampak ekonomi pariwisata, atau strategi pemasaran destinasi wisata (Lestari et al., 2025). Kajian yang secara khusus menelaah bagaimana divergensi *belief systems* membentuk dinamika kelembagaan, memengaruhi tata kelola destinasi, dan berdampak pada keberlanjutan pariwisata masih relatif terbatas (Amelia et al., 2026). Padahal, pemahaman mengenai aspek kognitif dan ideologis para aktor menjadi penting untuk menjelaskan mengapa kebijakan yang dirancang



dengan tujuan yang sama dapat menghasilkan tingkat keberhasilan yang berbeda pada masing-masing desa wisata.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana divergensi *belief systems* para aktor memengaruhi terwujudnya *sustainable tourism governance* pada desa wisata berbasis *Community-Based Tourism* di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi pola pembentukan koalisi advokasi, mekanisme mobilisasi sumber daya, serta peluang terjadinya *policy-oriented learning* sebagai sarana rekonsiliasi kepentingan antaraktor. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian *Advocacy Coalition Framework* dalam konteks pariwisata berkelanjutan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola desa wisata yang mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan perdesaan (Cairney, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang mengacu pada kerangka metodologis yang dikembangkan oleh Creswell dan Creswell (2018). Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata membangun, mempertahankan, dan mengartikulasikan *belief systems* mereka dalam proses implementasi kebijakan pariwisata berbasis *Community-Based Tourism* (CBT). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika tata kelola pariwisata, hubungan antaraktor, konflik kepentingan, serta proses negosiasi yang memengaruhi terwujudnya *sustainable tourism governance* pada tingkat lokal (Creswell & Creswell, 2023).

Secara filosofis, penelitian ini berlandaskan pada paradigma konstruktivisme sosial (*social constructivism*) dan paradigma advokasi-partisipatori (Creswell & Creswell, 2023). Paradigma konstruktivisme memandang bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan interpretasi para aktor terhadap pengalaman serta lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, makna mengenai keberlanjutan pariwisata, pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya wisata, dan distribusi manfaat ekonomi dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berbeda di antara para pemangku kepentingan. Sementara itu, paradigma advokasi-partisipatori digunakan untuk memberikan ruang analisis terhadap kelompok-kelompok lokal yang sering kali memiliki posisi tawar yang lebih rendah dalam proses pengambilan keputusan, seperti pengurus Pokdarwis, kelompok masyarakat adat, nelayan tradisional, pengelola usaha wisata mikro, dan komunitas lokal yang terdampak langsung oleh kebijakan pengembangan desa wisata.

Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* pada empat desa wisata di Kabupaten Banyuwangi yang merepresentasikan karakteristik tata kelola dan dinamika kelembagaan yang berbeda, yaitu Desa Adat Kemiren (Kecamatan Glagah), Desa Wisata Tamansari (Kecamatan Licin), Desa Wisata Kampunganyar (Kecamatan Glagah), dan Desa Wisata Bangsring (Kecamatan Wongsorejo). Keempat lokasi tersebut dipilih karena menunjukkan variasi tingkat partisipasi masyarakat, model pengelolaan destinasi, karakteristik sumber daya wisata, serta intensitas interaksi antara BUMDes, Pokdarwis, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat lokal. Selain itu, keempat desa tersebut juga memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata

berkelanjutan di Banyuwangi sehingga relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif *Advocacy Coalition Framework* (ACF).

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata, Peraturan Desa Bangsring Nomor 4 Tahun 2018, dokumen perencanaan pembangunan desa, laporan pemerintah daerah, dokumen kelembagaan desa wisata, laporan kementerian terkait, publikasi media massa, serta artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan tata kelola pariwisata, *Community-Based Tourism*, keberlanjutan lingkungan, dan implementasi kebijakan publik. Penggunaan berbagai sumber dokumenter tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan dan hubungan antaraktor dalam pengelolaan desa wisata.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles et al. (2014). Tahap pertama adalah kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan informasi yang berkaitan dengan divergensi *belief systems*, pembentukan koalisi advokasi, konflik kelembagaan, serta praktik tata kelola pariwisata pada masing-masing desa wisata. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*) melalui matriks analitis dan pemetaan hubungan antaraktor untuk mengidentifikasi pola interaksi, distribusi kekuasaan, serta perbedaan orientasi kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*) yang dilakukan secara berulang guna memastikan konsistensi temuan serta membangun interpretasi yang valid mengenai pengaruh divergensi *belief systems* terhadap terwujudnya *sustainable tourism governance*.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) sebagai kerangka konseptual utama dalam mengidentifikasi aktor, memetakan koalisi advokasi, serta menganalisis interaksi antara *deep core beliefs*, *policy core beliefs*, dan *secondary beliefs* yang berkembang dalam sistem kebijakan desa wisata. Kerangka ini memungkinkan penelitian menjelaskan bagaimana perbedaan sistem keyakinan memengaruhi proses pengambilan keputusan, kolaborasi kelembagaan, pengelolaan sumber daya wisata, serta upaya mewujudkan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desa wisata berbasis *Community-Based Tourism* (CBT) di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya wisata maupun dukungan regulasi pemerintah daerah. Lebih jauh, keberhasilan mewujudkan *sustainable tourism governance* sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antaraktor yang membawa sistem keyakinan (*belief systems*) berbeda mengenai arah pembangunan, distribusi manfaat ekonomi, serta pengelolaan sumber daya sosial dan lingkungan.

Analisis menggunakan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) memperlihatkan bahwa dinamika kebijakan desa wisata di Banyuwangi berlangsung dalam arena kontestasi antara kelompok yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kelompok yang menempatkan keberlanjutan komunitas serta konservasi lingkungan sebagai prioritas utama. Perbedaan orientasi tersebut membentuk pola tata kelola yang beragam pada setiap desa wisata dan menghasilkan konsekuensi berbeda terhadap keberlanjutan destinasi.

Divergensi *Belief Systems* dan Tantangan *Sustainable Tourism Governance*



Analisis kebijakan pariwisata perdesaan menggunakan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) bertumpu pada asumsi bahwa kebijakan publik merupakan hasil interaksi dan persaingan berbagai koalisi aktor yang beroperasi dalam suatu sub-sistem kebijakan tertentu. Sub-sistem tersebut dihuni oleh aktor dari berbagai latar belakang kelembagaan, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal yang memiliki kepentingan terhadap isu kebijakan yang sama (Cairney, 2019).

Pengikat utama yang menyatukan aktor ke dalam koalisi bukan sekadar kepentingan pragmatis, melainkan kesamaan sistem keyakinan (*belief systems*) yang membentuk cara mereka memahami masalah dan merumuskan solusi kebijakan (Cairney, 2011). Dalam konteks pengembangan desa wisata, sistem keyakinan tersebut memengaruhi cara aktor memandang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sabatier membagi *belief systems* ke dalam tiga tingkatan hierarkis, yaitu *deep core beliefs*, *policy core beliefs*, dan *secondary beliefs* (Henry et al., 2014). Pada level *deep core beliefs*, aktor membawa nilai-nilai fundamental seperti pandangan mengenai hubungan manusia dan alam, keadilan sosial, maupun orientasi ekonomi yang menjadi dasar seluruh tindakan mereka. Pada level *policy core beliefs*, nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi visi pembangunan desa wisata yang lebih konkret, misalnya apakah pariwisata harus diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Sementara itu, *secondary beliefs* berkaitan dengan aspek operasional seperti tata kelola destinasi, pembagian keuntungan, sistem tiket, hingga mekanisme pengelolaan lingkungan.

Dalam perspektif *sustainable tourism governance*, ketiga lapisan keyakinan tersebut berperan penting karena menentukan bagaimana aktor memaknai konsep keberlanjutan. Sebagian aktor mengartikan keberlanjutan sebagai kemampuan destinasi menghasilkan pendapatan ekonomi secara terus-menerus, sementara aktor lain menempatkan keberlanjutan sebagai kemampuan menjaga daya dukung lingkungan, identitas budaya, dan kesejahteraan masyarakat lintas generasi. Perbedaan interpretasi inilah yang menjadi akar berbagai dinamika tata kelola desa wisata di Banyuwangi.

Pemetaan Koalisi Aktor dalam Sub-Sistem Kebijakan Desa Wisata Banyuwangi

Berdasarkan analisis terhadap pola hubungan antaraktor, penelitian ini mengidentifikasi dua koalisi utama yang mendominasi implementasi kebijakan desa wisata di Banyuwangi, yaitu Koalisi Pengembang Berorientasi Ekonomi-Korporat dan Koalisi Pelestari Berbasis Komunitas-Konservasi (Amelia et al., 2026).

Tabel 1. Pemetaan Struktur Sistem Keyakinan, Sumber Daya, dan Strategi Koalisi Advokasi di Desa Wisata Banyuwangi

Elemen Analisis	Koalisi Pengembang Berorientasi Ekonomi-Korporat	Koalisi Pelestari Berbasis Komunitas-Konservasi
Aktor Pendukung Utama	Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes, Investor/Pihak Ketiga Swasta, Pemilik Lahan Pribadi Kapitalistik (Amelia et al., 2026)	Pokdarwis, Pokmaswas, Lembaga Adat, Nelayan Tradisional, Pegiat Lingkungan (Mubarok & Lokaprasidha, 2020)

Deep Core Beliefs	Utilitarianisme, antroposentrisme, efisiensi pasar, pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kesejahteraan (Amelia et al., 2026)	Ekosentrisme, komunitarianisme, keadilan distributif, pelestarian budaya dan lingkungan (Mubarok & Lokaprasidha, 2020)
Policy Core Beliefs	Pariwisata dikelola secara profesional melalui BUMDes untuk meningkatkan PADes (Amelia et al., 2026)	Pariwisata dikelola berbasis komunitas dengan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama (Lestari et al., 2025)
Secondary Beliefs	Tiket elektronik, integrasi aset wisata ke BUMDes, kemitraan investasi luar (Egidia, 2018)	Homestay mandiri, arsitektur tradisional, gotong royong, rotasi kepengurusan (Amelia et al., 2026)
Sumber Daya Utama	Regulasi formal, APBDes, investasi, birokrasi, kepemilikan lahan (Egidia, 2018)	Modal sosial, legitimasi adat, pengetahuan lokal, dukungan komunitas (Amelia et al., 2026)
Strategi Aksi	Mobilisasi regulasi, pengembangan infrastruktur, investasi, standarisasi layanan (Egidia, 2018)	Advokasi komunitas, konservasi lingkungan, musyawarah adat, penguatan partisipasi warga (Amelia et al., 2026)

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa konflik yang muncul dalam pengelolaan desa wisata bukan sekadar konflik administratif, melainkan konflik paradigma pembangunan. Koalisi Pengembang menempatkan efisiensi ekonomi sebagai prioritas utama dan melihat profesionalisasi tata kelola sebagai syarat penting bagi daya saing destinasi wisata. Sebaliknya, Koalisi Pelestari memandang bahwa keberhasilan pariwisata harus diukur dari kemampuan menjaga identitas budaya, keberlanjutan ekologi, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal.

Dari perspektif *sustainable tourism governance*, kedua orientasi tersebut sesungguhnya tidak harus dipertentangkan. Tantangan utama terletak pada bagaimana tata kelola mampu mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan konservasi lingkungan dan pemberdayaan komunitas. Ketika salah satu orientasi terlalu dominan, maka keseimbangan pembangunan menjadi terganggu. Dominasi logika ekonomi berpotensi mendorong eksploitasi sumber daya dan komersialisasi budaya, sedangkan dominasi konservasi tanpa inovasi ekonomi dapat membatasi peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Eksplorasi Empiris Dinamika Kontestasi Kognitif pada Desa Wisata di Banyuwangi

Analisis pada empat desa wisata menunjukkan bahwa divergensi *belief systems* tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi termanifestasi secara nyata dalam pola pengelolaan destinasi, mekanisme distribusi manfaat ekonomi, pengambilan keputusan kelembagaan, serta strategi konservasi lingkungan. Setiap desa wisata memperlihatkan bentuk kontestasi yang berbeda sesuai karakteristik sumber daya wisata, struktur sosial masyarakat, dan konfigurasi aktor yang terlibat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi *Community-Based Tourism* (CBT) sangat bergantung pada kemampuan aktor untuk membangun konsensus mengenai tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Ketika orientasi ekonomi, sosial, dan lingkungan tidak berjalan secara seimbang, maka konflik kelembagaan cenderung meningkat dan menghambat terwujudnya *sustainable tourism governance*.

Desa Adat Kemiren: Kontestasi antara Pelestarian Budaya dan Komersialisasi Pariwisata



Desa Adat Kemiren merupakan representasi desa wisata budaya yang menjadikan identitas masyarakat Osing sebagai daya tarik utama wisata. Dalam konteks ini, budaya tidak hanya diposisikan sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas sosial yang harus dijaga keberlanjutannya. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat adat dan kelompok pengelola berbasis komunitas memandang bahwa setiap bentuk pengembangan wisata harus tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Namun demikian, meningkatnya kunjungan wisatawan dan berkembangnya pasar pariwisata mendorong munculnya kelompok aktor yang melihat budaya sebagai komoditas ekonomi yang dapat dikembangkan secara lebih profesional. Perbedaan cara pandang tersebut menghasilkan ketegangan dalam berbagai aspek pengelolaan destinasi, mulai dari penyelenggaraan festival budaya, pengembangan fasilitas wisata, hingga komersialisasi ruang-ruang adat yang sebelumnya bersifat sakral.

Menurut perspektif *Advocacy Coalition Framework*, kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan antara *policy core beliefs* yang berbeda. Kelompok pertama meyakini bahwa keberhasilan pembangunan wisata harus diukur dari kemampuan menjaga keberlanjutan budaya dan identitas lokal, sedangkan kelompok kedua menilai bahwa peningkatan nilai ekonomi destinasi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan.

Dari sudut pandang *sustainable tourism governance*, konflik tersebut menjadi penting karena keberlanjutan destinasi budaya sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi dan autentisitas budaya. Ketika komersialisasi berlangsung secara berlebihan, terdapat risiko terjadinya degradasi makna budaya yang justru dapat mengurangi daya tarik wisata dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika pengelolaan terlalu tertutup terhadap inovasi ekonomi, maka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal menjadi terbatas. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa tata kelola destinasi wisata budaya memerlukan mekanisme kolaboratif yang memungkinkan aktor ekonomi dan aktor budaya membangun kesepakatan mengenai batas-batas pemanfaatan budaya sebagai komoditas wisata.

Desa Wisata Tamansari: Modernisasi Pariwisata dan Kesenjangan Kapasitas Komunitas

Berbeda dengan Kemiren yang berorientasi pada wisata budaya, Desa Wisata Tamansari berkembang sebagai kawasan penyangga destinasi unggulan Kawah Ijen yang memiliki daya tarik wisata alam berskala internasional. Posisi strategis tersebut mendorong masuknya berbagai bentuk investasi dan modernisasi pengelolaan wisata yang relatif lebih cepat dibandingkan desa wisata lainnya.

Masuknya investasi dan meningkatnya tuntutan pasar wisata mendorong lahirnya berbagai inovasi tata kelola, termasuk digitalisasi promosi, penguatan jaringan pemasaran, peningkatan standar pelayanan wisata, serta pengembangan kemitraan dengan sektor swasta. Bagi kelompok aktor yang berorientasi ekonomi, transformasi tersebut dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing destinasi dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal secara merata. Sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi digital, memahami standar pelayanan wisata modern, maupun mengelola usaha wisata secara profesional.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan kelompok yang tertinggal dalam proses transformasi

tersebut. Dalam jangka panjang, kesenjangan kapasitas ini berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi yang bertentangan dengan prinsip dasar *Community-Based Tourism*.

Dari perspektif *sustainable tourism governance*, keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah wisatawan atau pertumbuhan ekonomi destinasi, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas (*capacity building*) menjadi komponen penting yang harus berjalan seiring dengan modernisasi sistem pengelolaan wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata tidak dapat dicapai hanya melalui investasi fisik dan pengembangan infrastruktur. Lebih dari itu, diperlukan investasi sosial berupa pendidikan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan komunitas agar masyarakat lokal tetap menjadi aktor utama dalam proses pembangunan wisata berkelanjutan.

Desa Wisata Kampunganyar: Fragmentasi Kelembagaan dan Ancaman terhadap Keberlanjutan

Kasus Desa Wisata Kampunganyar memperlihatkan bentuk kontestasi yang lebih kompleks dibandingkan dua desa sebelumnya. Konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan orientasi pembangunan wisata, tetapi juga menyangkut persoalan kelembagaan dan kepemilikan sumber daya wisata. Penelitian menemukan adanya fragmentasi hubungan antara BUMDes, Pokdarwis, pemilik lahan pribadi, serta kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda terhadap pengelolaan destinasi wisata. Fragmentasi tersebut menyebabkan lemahnya koordinasi, tumpang tindih kewenangan, serta munculnya berbagai konflik kepentingan dalam pengelolaan wisata.

Selain itu, lemahnya proses regenerasi organisasi dan transfer pengetahuan turut memperburuk kondisi kelembagaan. Ketika kepemimpinan berganti, banyak pengalaman dan pengetahuan pengelolaan wisata yang tidak terdokumentasi dengan baik sehingga efektivitas pengelolaan destinasi mengalami penurunan.

Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan dan keberlanjutan destinasi. Pengelolaan sampah yang kurang optimal, rendahnya koordinasi konservasi kawasan wisata, serta minimnya investasi sosial menjadi indikasi bahwa tata kelola yang terfragmentasi dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Desa Wisata Bangsring: Model Rekonsiliasi Menuju *Sustainable Tourism Governance*

Berbeda dengan Desa Kemiren, Tamansari, dan Kampunganyar yang masih menghadapi berbagai bentuk ketegangan kelembagaan, Desa Wisata Bangsring menunjukkan contoh yang relatif berhasil dalam membangun tata kelola pariwisata yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Temuan ini menjadi menarik karena Bangsring pada awalnya menghadapi persoalan lingkungan yang cukup serius akibat praktik penangkapan ikan destruktif yang menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan terumbu karang. Namun, melalui proses transformasi kelembagaan yang panjang, Bangsring berhasil mengubah kawasan yang sebelumnya rentan mengalami degradasi lingkungan menjadi salah satu destinasi wisata bahari berbasis konservasi yang dikenal secara nasional.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan para aktor lokal dalam membangun kesamaan visi mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan konservasi sumber daya alam. Dalam perspektif *Advocacy Coalition Framework* (ACF), kondisi ini menunjukkan terjadinya proses penyesuaian pada tingkat *secondary beliefs*, di mana aktor-aktor



yang sebelumnya memiliki perbedaan kepentingan mulai menemukan titik temu dalam aspek operasional pengelolaan destinasi. Meskipun masing-masing aktor tetap mempertahankan orientasi dasar yang berbeda, mereka mampu menyepakati mekanisme tata kelola yang memberikan ruang bagi kepentingan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Salah satu faktor penting yang mendorong keberhasilan tersebut adalah hadirnya Peraturan Desa Bangsring Nomor 4 Tahun 2018 yang berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi regulatif. Regulasi ini memberikan kepastian mengenai pembagian peran antara BUMDes, Pokdarwis, Pokmaswas, pemerintah desa, dan masyarakat lokal. Melalui regulasi tersebut, konflik kewenangan yang sebelumnya berpotensi menghambat pengelolaan destinasi dapat diminimalkan karena setiap aktor memiliki posisi dan fungsi yang lebih jelas dalam sistem tata kelola wisata.

Dari perspektif *sustainable tourism governance*, keberadaan regulasi lokal tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam atau partisipasi masyarakat, tetapi juga pada kualitas institusi yang mampu mengelola hubungan antaraktor secara adil dan transparan. Regulasi yang adaptif memungkinkan berbagai kepentingan dapat diakomodasi tanpa mengorbankan tujuan konservasi maupun kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, keberhasilan Bangsring juga memperlihatkan pentingnya integrasi antara konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aktivitas wisata bahari yang berkembang di kawasan ini tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Dengan demikian, konservasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan pembangunan ekonomi, melainkan sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan destinasi wisata itu sendiri.

Fenomena ini memperkuat argumentasi bahwa *Community-Based Tourism* yang dikelola secara kolaboratif mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bangsring dapat diposisikan sebagai contoh praktik baik (*best practice*) yang menunjukkan bagaimana tata kelola berbasis komunitas dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya pada aspek konservasi sumber daya alam, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan komunitas pesisir.

Tabel 2. Matriks Dinamika *Belief Systems* dan Implikasinya terhadap *Sustainable Tourism Governance* di Desa Wisata Banyuwangi

Desa Wisata	Dominasi Koalisi	Bentuk Divergensi <i>Belief Systems</i>	Dampak terhadap Tata Kelola	Implikasi terhadap Keberlanjutan
Kemiren	Relatif Seimbang	Pelestarian budaya vs komersialisasi wisata	Negosiasi berkelanjutan dalam pengelolaan atraksi budaya	Menjaga identitas budaya namun rentan terhadap tekanan pasar
Tamansari	Pengembang Berorientasi Ekonomi	Modernisasi destinasi vs kapasitas komunitas	Ketimpangan kapasitas dalam pengelolaan wisata	Pertumbuhan ekonomi meningkat namun perlu penguatan SDM lokal

Kampunganyar	Fragmentasi Koalisi	Konflik kelembagaan dan kepemilikan sumber daya	Koordinasi lemah dan pengelolaan tidak terintegrasi	Risiko terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan
Bangsring	Kolaboratif	Perbedaan kepentingan direkonsiliasi melalui regulasi	Tata kelola kolaboratif dan pembagian peran yang jelas	Menjadi model <i>sustainable tourism governance</i> berbasis komunitas

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan tata kelola pariwisata berkelanjutan pada masing-masing desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor dalam mengelola perbedaan sistem keyakinan. Desa yang mampu membangun mekanisme kolaboratif dan ruang dialog yang efektif cenderung menunjukkan kinerja tata kelola yang lebih baik dibandingkan desa yang mengalami fragmentasi kelembagaan dan konflik berkepanjangan.

Policy-Oriented Learning sebagai Mekanisme Rekonsiliasi Antaraktor

Temuan penelitian menunjukkan bahwa divergensi *belief systems* tidak selalu menghasilkan konflik yang bersifat permanen. Dalam kerangka ACF, perubahan kebijakan dan perbaikan tata kelola dapat terjadi melalui proses *policy-oriented learning*, yaitu proses pembelajaran kolektif yang memungkinkan para aktor meninjau kembali asumsi, strategi, dan praktik yang mereka gunakan dalam mengelola suatu kebijakan (Cairney, 2011).

Pada kasus Banyuwangi, proses pembelajaran tersebut terjadi ketika para aktor mulai menyadari bahwa keberhasilan desa wisata tidak dapat dicapai hanya melalui dominasi satu kepentingan tertentu. Kelompok yang berorientasi ekonomi mulai memahami pentingnya konservasi lingkungan dan pelestarian budaya sebagai modal utama destinasi wisata, sementara kelompok konservasi mulai menyadari bahwa keberlanjutan program membutuhkan dukungan ekonomi yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Proses pembelajaran ini terlihat jelas pada perubahan pendekatan pengelolaan wisata pascapandemi COVID-19. Krisis yang terjadi memaksa berbagai aktor untuk beradaptasi melalui penguatan kolaborasi, digitalisasi promosi, diversifikasi produk wisata, serta pengembangan model usaha yang lebih fleksibel. Situasi tersebut menunjukkan bahwa guncangan eksternal (*external shocks*) dapat menjadi katalisator penting dalam mendorong perubahan pada tingkat *secondary beliefs* tanpa harus mengubah keyakinan inti yang dimiliki masing-masing koalisi.

Selain itu, penelitian juga menemukan pentingnya peran *policy brokers* sebagai mediator yang menjembatani perbedaan kepentingan antaraktor. Dalam konteks Banyuwangi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan sejumlah tokoh masyarakat berperan sebagai fasilitator dialog yang membantu membangun komunikasi lintas koalisi. Kehadiran *policy brokers* terbukti mampu mengurangi eskalasi konflik, memperkuat koordinasi kelembagaan, dan menciptakan ruang negosiasi yang lebih konstruktif. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai implementasi *Community-Based Tourism* dengan menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kapasitas institusional untuk memfasilitasi pembelajaran kolektif dan membangun kesepakatan bersama di tengah keberagaman sistem keyakinan yang ada.



Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa *sustainable tourism governance* pada desa wisata berbasis *Community-Based Tourism* merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh dinamika kognitif dan politik antaraktor. Keberlanjutan destinasi tidak hanya bergantung pada potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan sistem tata kelola dalam mengelola perbedaan kepentingan, membangun kolaborasi, memperkuat kelembagaan lokal, serta menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pariwisata berkelanjutan, khususnya pada destinasi wisata perdesaan yang mengandalkan partisipasi komunitas sebagai fondasi utama pembangunan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desa wisata berbasis *Community-Based Tourism* (CBT) di Kabupaten Banyuwangi sangat dipengaruhi oleh divergensi *belief systems* antaraktor yang terlibat dalam tata kelola destinasi. Melalui perspektif *Advocacy Coalition Framework* (ACF), ditemukan adanya dua koalisi utama, yaitu Koalisi Pengembang Berorientasi Ekonomi-Korporat dan Koalisi Pelestari Berbasis Komunitas-Konservasi, yang memiliki perbedaan mendasar dalam memaknai tujuan pembangunan pariwisata. Divergensi tersebut tercermin dalam berbagai bentuk kontestasi terkait distribusi manfaat ekonomi, pengelolaan sumber daya wisata, pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi destinasi atau dukungan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aktor dalam mengelola perbedaan nilai dan kepentingan yang mendasari proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian pada Desa Kemiren, Tamansari, Kampunganyar, dan Bangsring menunjukkan bahwa kualitas *sustainable tourism governance* sangat bergantung pada tingkat kolaborasi kelembagaan yang terbangun di antara para pemangku kepentingan. Desa yang mengalami fragmentasi kelembagaan dan konflik berkepanjangan cenderung menghadapi hambatan dalam menjaga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebaliknya, Desa Bangsring memperlihatkan bahwa rekonsiliasi regulatif, pembagian peran yang jelas, serta integrasi antara konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mampu menghasilkan tata kelola yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan pariwisata perdesaan membutuhkan keseimbangan antara orientasi pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan kapasitas komunitas lokal.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas aplikasi ACF dalam kajian pariwisata berkelanjutan dengan menunjukkan bahwa proses *policy-oriented learning* dan peran *policy brokers* menjadi faktor penting dalam mereduksi konflik antaraktor dan membangun konsensus kebijakan. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan penguatan ruang dialog multipihak, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, serta pengembangan mekanisme tata kelola kolaboratif yang mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna mengukur pengaruh konfigurasi koalisi aktor terhadap kinerja keberlanjutan desa wisata secara lebih komprehensif, termasuk pada aspek kesejahteraan masyarakat, konservasi lingkungan, dan ketahanan destinasi wisata dalam menghadapi perubahan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. N. A. H., Setyowati, E., & Sujarwoto. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus Destinasi Wisata Penyangga Zona Kawah Ijen Desa Adat Osing Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 5(6), 394–401. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1553>
- Amelia, L., Azizah, N., Dewi, K., Permana, Y., Manuel, J., Maulana, H., & Yudhiasta, S. (2026). The Implementation of Community-Based Tourism in Managing Sustainable Tourist Attractions: A Case Study of Kampunganyar Tourism Village, Glagah District, Banyuwangi. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 10, 608–613. <https://doi.org/10.11594/nstp.2026.5485>
- Anggraini, R., Firmansyah, I., Yulianto, H., Maulidina, N. D., & Angin, R. (2024). Collaborative Process Government dalam Pengembangan Wisata Pantai Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi. *CONSILIUM Journal: Journal Education and Counseling*, 4(2), 569–579. <https://doi.org/10.36841/consilium.v4i2.5612>
- Cairney, P. (2011). *Understanding Public Policy: Theories and Issues*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-35699-3>
- Cairney, P. (2019). The Advocacy Coalition Framework. In *Understanding Public Policy* (pp. 3–4). <https://paulcairney.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/03/chapter-10-acf-upp-2nd-ed-9.3.19.pdf>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.4337/9781784711986.00010>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Egidia, A. D. (2018). *Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata (Studi di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)*. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/162796/1/Ayang%20Della%20Egidia.pdf>
- Fairuza, M. (2019). *Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)*. Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/67701/1/Sec.pdf>
- Fitriyani, D., Vitasari, L., & Agustina, E. (2024). Tourism Village Management Based on Local Community Participation in Kemiren Village, Glagah District, Banyuwangi Regency. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 8(2), 1761–1769. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.695>
- Henry, A. D., Ingold, K., Nohrstedt, D., & Weible, C. M. (2014). Policy Change in Comparative Contexts: Applying the Advocacy Coalition Framework Outside of Western Europe and North America. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16(4), 299–312. <https://doi.org/10.1080/13876988.2014.941200>
- Latianingsih, N., Mariam, I., Pratama, A. P., Sofia, M., & Chandra, I. (2025). Implementation of Tourism Village Management Policy with a Community-Based Tourism Approach in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 570–576. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-938-4_64



- Lestari, D. A., Habsari, W., Iskandar, R. Y., & Sundjaja, A. P. (2025). Model Pengembangan Community-Based Tourism Wisata Penawar Sari di Desa Ketapang, Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 4(2), 437–455. <https://journalcenter.org/index.php/jempper/article/view/4260/3363>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mubarok, A. M., & Lokaprasidha, P. (2020). Community-Based Tourism (CBT) as a Model of Tourism and Self-Reliance Development of Coastal Villages in Banyuwangi. *Proceedings of the 1st International Conference on Applied Social Sciences, Business, and Humanity (ICO-ASCNITY)*, 1–12. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.1-11-2019.2293990>
- Novrizaldi. (2024). Desa Wisata Bangsring, Praktik Baik Peralihan Desa Miskin Jadi Sejahtera. *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkopmk.go.id/desa-wisata-bangsring-praktik-baik-peralihan-desa-miskin-jadi-sejahtera>
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2024). Ke Bangsring Underwater Banyuwangi, Menko PMK: Ini Contoh Desa Wisata Inovatif. *Pemerintah Kabupaten Banyuwangi*. <https://banyuwangikab.go.id/berita/ke-bangsring-underwater-banyuwangi-menko-pmk-ini-contoh-desa-wisata-inovatif>
- Peraturan Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Wisata dan Usaha Wisata Atraksi Wisata serta Kegiatan Penunjang Wisata Lainnya Desa Bangsring. (2018). https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perdes/PERDES_TENTANG_PENGEMBANGAN_KAWASAN_WISATA_DAN_USAHA_WISATA_ATRAKSI_WISATA_SERTA_KEGIATAN_PENUNJANG_WISATA_LAINNYA_DESA_BANGSRING_2018_11zon.pdf
- Rahargiyanto, N. F. P. (2019). *Konstruksi Identitas Suku Osing dalam Pusaran Pariwisata di Desa Wisata Adat Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/175040/1/Niken%20Fortuna%20Pamungkas%20Rahargiyanto.pdf>
- Rodrigues, D. C., Sobrinho, M. V., Maria, A., & Vasconcellos, D. A. (2020). Advocacy Coalition Formation and Key Actors Within the Policy Process. *Revista de Administração Pública*, 54(6), 1711–1728. <https://doi.org/10.1590/0034-761220190450x>
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Avalon Publishing.
- Silalahi, A. T., & Asy'ari, R. (2022). Desa Wisata Kemiren: Menemukanali dari Perspektif Indikator Desa Wisata dan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination*, 1(1), 14–24. <https://doi.org/10.55123/toba.v1i1.104>
- Sosiawan, A. (2022). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Masa Pandemi COVID-19. *Pallangga Praja*, 4(1), 23–31. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/download/2637/1268>
- Sumarmi, Bachri, S., Irawan, L. Y., & Kurniawati, E. (2020). Cultural Ecology of Osing in Development of Kemiren Tourist Village as International Tourist Attraction Cultural. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485(1), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012017>
- Sumarmi, S., Ensiyawatin, A. Z., Astina, I. K., Kurniawati, E., & Shrestha, R. P. (2022). The Management of Bangsring Underwater as Conservation-Based Ecotourism for

International Tourism Destination. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 41(2), 393–399. <https://doi.org/10.30892/gtg.41208-842>

Utami, B. S. A. (2022). Model Pengembangan Desa Wisata Tamansari Banyuwangi sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Desa Pasca Pandemi COVID-19. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 7(1), 91–100. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.7.1.91-100>